

**PERAN ILMU PENDIDIKAN
DALAM MEMBENTUK KARAKTER BANGSA YANG BERMARTABAT?
(Penggalian dan penerapan konsep ilmu pendidikan ala Indonesia: teori-teori yang berkembang serta aktualisasinya?)**

**Oleh:
Achmad Dardiri
(Dekan FIP UNY)**

Abstrak

Munculnya permasalahan pendidikan tidak hanya disebabkan oleh faktor internal dunia pendidikan itu sendiri, melainkan juga oleh faktor eksternal, yakni “dunia lain”, utamanya dunia politik dan ekonomi. Interaksi antara dunia pendidikan dan dunia lain sudah barang tentu merupakan suatu keniscayaan, karena proses pendidikan tidak berada dalam kevakuman, tidak steril dari pengaruh dunia lain, melainkan akan selalu berinteraksi secara timbal balik antara dua dunia tersebut. Dari sinilah nampaknya yang mendorong bergesernya fungsi pendidikan, yakni dari fungsinya yang utama sebagai pemelihara tradisi, pemelihara nilai-nilai luhur bangsa yang kita junjung tinggi dan sekaligus sebagai sumber inspirasi, bergeser ke fungsinya yang lain yakni fungsi pengembangan sumberdaya manusia dalam arti ikut mempersiapkan para lulusan dari lembaga pendidikan memasuki dunia kerja. Dengan makin bergesernya fungsi pendidikan inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab lunturnya komitmen kita akan pentingnya pendidikan dalam rangka *character and nation building*. Oleh sebab itu, merefleksi ulang peran pendidikan nasional dalam rangka *nation and character building* merupakan langkah yang sangat arif.

Pendahuluan

Mencari sosok ilmu pendidikan khas Indonesia nampaknya bukan perkara mudah, karena selama ini yang berkembang adalah ilmu pendidikan yang berasal dari Eropa dan Amerika Serikat. Hal ini sudah barang tentu tidak dapat dilepaskan dengan sarjana kita yang studi di Barat, termasuk buku-buku yang digunakan kebanyakan juga berasal dari buku-buku yang berasal dari Eropa dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, diskusi yang panjang dalam rangka pencarian sosok ilmu pendidikan ala Indonesia nampaknya masih on going process. Meskipun demikian, kekayaan ilmu pendidikan ala Indonesia dapat dilacak dari para pemikir dan ilmuwan sekaligus tokoh pendidikan Indonesia sendiri seperti Ki Hadjar Dewantara, Muhammad Syafei dll.

Dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas dinyatakan bahwa fungsi pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membangun watak serta peradaban bangsa.

Ketika orang mendengar kata ‘pendidikan’, yang terbayang pertama kali adalah isinya pasti soal nilai dan sikap yang sengaja ditanamkan kepada si terdidik (*transmission of values*), dan tentunya adalah nilai dan sikap yang positif, yang diharapkan mampu membawa kepada yang bersangkutan menjadi orang yang baik, atau bersikap baik, karena didorong oleh nilai-nilai kebaikan. Seolah-olah tiga aspek rohani manusia sudah tercakup di dalamnya, yakni aspek kognitif, afektif dan konatif. Ketika peserta didik diperkenalkan dengan nilai-nilai kebaikan tertentu untuk selanjutnya ditanamkan atau ditransmisikan kepada mereka, harapannya peserta didik sudah mengetahui atau mengenal nilai-nilai tersebut, kemudian merespons nilai-nilai tersebut dengan sikap pribadinya, untuk selanjutnya tergerak hatinya untuk mewujudkan nilai-nilai yang diketahuinya itu agar manifes dan menjadi pendorong untuk melakukan perbuatan baik dan terpuji. Inilah yang seharusnya terjadi (*das sollen*).

Akan tetapi, jika kita berpikir secara induktif, bertolak dari kejadian sehari-hari, baik dalam lingkungan masyarakat di sekitar tempat kita tinggal, atau ketika kita dalam perjalanan, maupun ketika kita menyaksikan lewat media massa, maka ternyata (*das sein*) bayangan kita meleset, karena bertolak belakang dengan apa yang kita bayangkan semula, setidaknya kurang sesuai dengan yang kita harapkan. Banyak di antara orang yang berpendidikan, ternyata mereka pulalah orang yang merusak citra pendidikan itu sendiri. Seolah-olah nilai dan sikap yang pernah ditanamkan kepada mereka sejak kecil sampai pada jenjang pendidikan tertinggi mereka, belum atau tidak pernah terjadi, atau lenyap begitu saja. Pertanyaan kita tentunya adalah “apa yang salah dari semua ini?” Apakah faktor individunya atau karena faktor lingkungan termasuk faktor pendidikannya? Ketika banyak warga bangsa kita yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi, narkoba, tindak kriminal dan perilaku negatif lainnya, yang notabene dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan, mungkin ada segelintir orang yang mencoba mengaitkan perilaku tersebut dengan karakter atau watak bangsa kita. Orang kemudian mencoba mengaitkan

antara pendidikan dengan pembentukan karakter dan pembangunan bangsa (*nation and character building*). Mungkin ada segelintir orang yang beranggapan bahwa istilah tersebut hanya relevan dan populer ketika awal kemerdekaan negeri ini, sehingga bagi generasi sekarang sudah dianggap tidak relevan lagi. Benarkah? Pendidikan, *by design* adalah untuk menjadikan orang yang bersangkutan menjadi lebih baik, lebih berbudaya, dan lebih beradab, ya sikapnya, ya karakternya, ya perilakunya. Dengan demikian, *nation and character building* mestinya tetap relevan sampai kapan pun sepanjang hal itu dikaitkan dengan pendidikan.

Manusia dan Pembangunan

Lalu, bagaimana seharusnya pembangunan di bidang pendidikan itu diupayakan agar mampu membentuk karakter dan membangun bangsa? Sebelum menjawab pertanyaan ini, perlu diketahui terlebih dahulu apa arti pembangunan itu sendiri? Poespowardojo mengartikan pembangunan sebagai usaha untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik (Poespowardojo, 1993: 47). Sudah barang tentu peningkatan mutu di sini yang dimaksud adalah bukan hanya pada sektor ekonomis semata, melainkan meliputi seluruh aspek kehidupannya. Dan ukuran yang dipakai untuk menunjukkan perbaikan hidup tersebut dapat berbeda-beda antara orang yang satu dan orang yang lain, atau antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain, atau antara bangsa yang satu dan bangsa yang lain.

Jika pembangunan dikaitkan dengan manusia, maka dapat dikatakan bahwa pembangunan selalu menunjuk pada manusia. Manusia adalah subyek pembangunan, dan ini berarti manusia adalah pelaksana sekaligus tujuan dari pembangunan itu sendiri. Dalam perspektif ini, pembangunan pada akhirnya tidak akan berhasil jika tidak memperhatikan manusia sebagai pelakunya, karena pada manusialah pembangunan benar-benar mempunyai akar yang kuat. Produksi misalnya, hanya dapat dihasilkan dan dapat diberikan secara kontinyu sepanjang manusia sanggup melaksanakannya. Oleh sebab itu, pembangunan secara struktural berarti membangun manusia pembangunan. Sebagai pelaksana pembangunan, manusia bukanlah mesin yang berjalan secara mekanistik, melainkan pribadi yang bekerja berdasarkan orientasi dan motivasi. Jadi, supaya pembangunan dapat berhasil, harus diberi perhatian khusus pada pelaksana-pelaksana sebagai *human investment*. Dengan memperhatikan pelaksana-pelaksana pembangunan berarti memberikan orientasi dan menghidupkan motivasi yang tepat dan benar untuk pembangunan.

Di samping itu, manusia adalah tujuan pembangunan. Justru di sinilah letak perbedaan orientasi kita dengan pandangan komunis yang totaliter. Manusia bukan sekedar sejumlah relasi sosial dan karena itu tidak dapat dinilai semata-mata sebagai faktor dalam masyarakat. Manusia dengan kekayaan sumber daya yang dimilikinya hidup dalam historisitas, namun hal itu tidak berarti bahwa eksistensi ditentukan dan bergantung sama sekali pada sejarah. Manusia adalah pribadi dan karena itu merupakan panggilan (*afgabe*) yang harus membangun untuk menentukan sejarah (Poespowardojo, 1993: 54-55). Dari uraian ini jelas, bahwa dalam pembangunan yang pertama dan utama yang menjadi fokus adalah manusianya. Dengan pendidikan, diharapkan manusia memiliki pengetahuan, nilai-nilai, sikap dan ketarmpilan yang memadai sebagai bekal dalam kehidupannya. Dalam konteks *nation and character building*, pembangunan harus menitik beratkan pada pembentukan karakter dan membangun bangsa yang berkepribadian, berwatak, dan bermoralitas baik, karena manusia adalah pelaku dan tujuan pembangunan itu sendiri. Sebagai pelaku pembangunan dia sangat menentukan corak masyarakat seperti apakah yang hendak diwujudkan. Dia adalah *the man behind the gun*. Yang penting bukan ilmu dan teknologinya, melainkan pemilik dan pengguna ilmu dan teknologi tersebut.

Pendidikan Watak

Watak atau karakter adalah paduan dari segala tabiat manusia yang bersifat tetap, sehingga menjadi “tanda” yang khusus untuk membedakan orang yang satu dari orang yang lain. Dalam bahasa Yunani dan Latin, “character” itu berasal dari perkataan “charassein” yang artinya mengukir corak yang tetap dan tidak terhapuskan. Karakter itu terjadinya karena perkembangan dasar yang telah terkena pengaruh dari ajar. Yang dinamakan “dasar” adalah bekal hidup atau “bakat”nya anak dari alam sebelum lahir, yang sudah menjadi satu dengan kodrat hidupnya anak (biologis). Sedangkan yang disebut “ajar” adalah segala sifat pendidikan dan pengajaran mulai anak dalam kandungan ibu hingga akil balig, yang dapat mewujudkan *intelligibel*, yakni tabiat yang dipengaruhi oleh masaknya angan-angan. Di dalam jiwa, karakter itu adalah imbalan yang tetap antara hidup batinnya seseorang dengan segala macam perbuatannya. Oleh sebab itu, seolah-olah menjadi “lajer” atau “sendi” di dalam hidupnya, yang lalu mewujudkan sifat perangai yang khusus buat satu-satunya manusia (Ki Hadjar Dewantara, 1977: 407-408)

Imam Barnadib (1978: 14) mengartikan watak dalam arti psikologis dan etis. Dalam arti psikologis, watak adalah sifat-sifat yang demikian nampak dan yang seolah-olah mewakili

pribadinya. Sedangkan dalam arti etis, watak harus mengenai nilai-nilai yang baik dan menunjukkan sifat-sifat yang selalu dapat dipercaya, sehingga orang yang berwatak itu menunjukkan sifat mempunyai pendirian yang teguh, baik, terpuji dan dapat dipercaya. Dengan demikian, watak berarti susunan batin atau kesatuan kepribadian dalam arti etis, dan jika hal ini dihubungkan dengan definisi kepribadian menurut pengertian pendidikan, maka kepribadian yang demikian inilah yang memenuhi syarat dalam arti pedagogis. Berwatak berarti memiliki prinsip dalam arti moral. Oleh sebab itu, watak yang tidak bermoral perlu dicegah kehadirannya dalam pergaulan hidup manusia. Hanya dengan cara ini perbuatan dapat dipertanggung jawabkan dalam arti moral. Berdasarkan pandangan tersebut, Imam Barnadib menandakan bahwa masalah watak berhubungan dengan masalah keagamaan. Agama mendidik manusia mengenal kebaikan dan berbuat yang baik, dan demikian pula pendidikan watak. Maka dari itu, pendidikan watak menjadi salah satu pendukung dari pendidikan agama.

Membentuk watak atau karakter bangsa bukanlah perkara mudah, karena dibutuhkan *political will* atau komitmen, utamanya dari pihak pemerintah atau penguasa yang memiliki power. Sejarah Indonesia telah mencatat bahwa pada dua dasa warsa pasca kemerdekaan Republik Indonesia, pembangunan nasional yang digarap pertama kali adalah di bidang politik yakni membangun bangsa dan karakter seluruh masyarakat Indonesia yang berisi semangat nasionalisme, rasa cinta kepada tanah air (Wibisono, 1998: 8; Poespowardojo, 1991: 2). Baru pada tahapan pembangunan selanjutnya bidang ekonomi mulai digarap. Dan pembangunan bidang-bidang yang lain ikut digarap seiring dengan perkembangan dalam dan luar negeri, termasuk karena didorong oleh banyaknya kritik yang diarahkan pada paradigma pertumbuhan ekonomi yang berdampak negatif pada rusaknya lingkungan hidup dan diabaikannya pembangunan sosial-budaya. Atas dasar hal ini, maka konsep dan paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable developmnet*) kemudian mulai mendapat perhatian semua kalangan, baik di tingkat nasional maupun global. Konsep dan paradigma ini mencoba mengakomodasi berbagai paradigma pembangunan, baik yang berasal dari pendukung paradigma pertumbuhan ekonomi, maupun dari kelompok pendukung paradigma lingkungan hidup dan sosial-budaya. Konsep dan paradigma pembangunan berkelanjutan juga sangat memperhatikan nasib generasi mendatang, karena dengan mengadakan pembangunan di bidang ekonomi, otomatis menggunakan sumber daya alam secara tidak terkontrol. Jika sumberdaya alam terkuras habis karena sangat bernaftu untuk mengadakan pembangunan, maka bagaimana nasib generasi

mendatang? Demikian argumentasi kelompok pendukung konsep dan paradigma pembangunan berkelanjutan (Tjokrowinoto, 2002: 11).

Fungsi Pendidikan

Benarkah pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan, utamanya dalam membentuk watak dan membangun bangsa? Jawabannya tentu ya, dan jawaban ini diperkuat antara lain oleh pendapat Plato tentang pendidikan. Gagasannya tentang pendidikan sebenarnya untuk menjawab persoalan bagaimana menimbang dan memilih para penjaga negara yang tidak hanya beringas dan sewenang-wenang terhadap sesama warga negara, tetapi juga yang tidak membahayakan eksistensi negara itu sendiri? Secara singkat, siapa “yang cocok” untuk menjadi penjaga negara? Dari pertanyaan tersebut kemudian disepakati bahwa para penjaga harus dipilih, dan kriteria untuk memilihnya adalah mereka yang berindra tajam, cekatan dalam memahami segala persoalan, kuat, berani, dan memiliki jiwa yang bersemangat. Di sini lalu timbul pertanyaan, bagaimana dapat diperoleh para penjaga dengan sifat-sifat semacam ini? Salah satu jawabannya adalah melalui pendidikan. Menurut Plato, pendidikan adalah alat pembentukan karakter, baik bagi para penjaga maupun bagi seluruh warga negara (dalam Jena, 2002: 54-55). Pendapat ini juga diperkuat oleh dua pendapat yang telah disinggung di depan, yakni dari Ki Hadjar Dewantara dan Imam barnadib.

Meskipun diyakini pendidikan dapat membentuk karakter dan membangun bangsa, tetapi dalam kenyataan sejarah bangsa kita, pembangunan manusia lewat pendidikan bergeser fungsinya dari fungsi menanamkan ideologi dan mewariskan nilai-nilai budaya bangsa kepada generasi baru ke fungsi ekonomis, yakni mempersiapkan tenaga kerja untuk bisa berpartisipasi dalam proses produksi. Jika fungsi pertama lebih menekankan fungsi pendidikan sebagai gejala kebudayaan, di mana pendidikan berfungsi untuk menciptakan *members of the nation-state*, sebagai warga negara yang baik, yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai anggota suatu masyarakat bangsa. Fungsi kedua pendidikan lebih sebagai gejala ekonomi, yakni mempersiapkan seseorang untuk memasuki pasar tenaga kerja lewat serangkaian proses pembelajaran. Adanya pergeseran fungsi pendidikan ini tentu bukan tanpa alasan. Alasannya, karena proses pendidikan tidak berlangsung dalam ruang kosong atau dalam kevakuman, melainkan berada di tengah-tengah perubahan masyarakat. Dalam ungkapan yang lebih spesifik, proses pendidikan itu berinteraksi dengan “dunia lain”, utamanya dunia politik dan ekonomi.

Bahkan dunia lain tersebut berupaya keras untuk dapat mendominasi dunia pendidikan. (Zamroni, 1993: 147-8).

Dari kenyataan tersebut, maka untuk membangun karakter dan bangsa diperlukan *political will* atau komitmen dari pemerintah atau penguasa. Mengapa? Karena sejarah telah membuktikan bahwa pemerintah atau penguasa sangat menentukan dalam membentuk karakter dan membangun bangsa, setidaknya hal itu telah dipraktekkan pada dua dasa warsa pasca kemerdekaan negeri ini dengan penekanan pada upaya membangun semangat nasionalisme. Bahkan pemerintah merupakan kekuatan utama yang mampu menentukan arah dan kebijakan pendidikan, di samping yang paling mampu menyediakan fasilitas pendidikannya. Ini berarti, arah dan kebijakan pendidikan banyak dipegaruhi oleh kepentingan ekonomi dan juga oleh kepentingan politik. Kalau keduanya berkolaborasi untuk menekan dan mendominasi pendidikan, maka akan muncul apa yang dinamakan *eco-paedagogical dictatorship* (Zamroni, 1993: 149).

Dengan adanya kesadaran bahwa proses pendidikan berlangsung dalam masyarakat yang selalu berubah (Fagerlind and Saha, 1983: 196), yang berinteraksi dengan dunia lain, utamanya dengan dunia politik dan ekonomi, maka menjadi tidak mungkin, jika kita bangsa Indonesia hanya mempertahankan fungsi konservatif pendidikan tanpa terlibat dalam fungsi pendidikan yang lain yakni fungsi pengembangan sumber daya manusianya. Dengan fungsi ini pendidikan juga ikut mempersiapkan lulusannya memasuki dunia kerja. Meskipun demikian, bangsa Indonesia harus tetap pada komitmennya dan merealisasikan komitmennya untuk lebih mengedepankan aspek moralitas bangsa dalam kiprah pembangunannya, dan itu berarti pendidikan nilai, pendidikan watak dan pendidikan moral harus lebih dikedepankan daripada pendidikan yang lainnya, karena pendidikan nilai, watak dan moral melandasi aspek-aspek pendidikan yang lain.

SUMBER BACAAN

- Barnadib, Imam (1978). *Filsafat Pendidikan (Tinjauan Mengenai Beberapa Aspek dan Proses Pendidikan)*. Yogyakarta: Penerbit “STUDING”.
- Dewantata, Ki Hadjar (1977). *Bagian Pertama: PENDIDIKAN*. Yogyakarta: Diterbitkan oleh Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Fagerlind, Ingemar and Lawrence J. Saha (1983). *Education and National Development: A Comparative Perspective*. Oxford: PERGAMON PRESS.
- Jene, Jeremias (2002). “Pendidikan sebagai Kontrol Sosial dan Kebebasan Individu: Diskursus mengenai Pendidikan menurut Plato” dalam Majalah Filsafat *Driyarkara*. Th. XXV Nomor 4, April 2002.
- Pospowardojo, Soerjanto (1991). *Pembangunan Nasional dalam Perspektif Budaya: Suatu Pendekatan Filsafat*. . Pidato Pengukuhan guru Besar Tetap dala Ilmu Filsafat pada fakultas sastra Universitas Indonesia di jakarta pada tanggal 30 November 1991.
- _____ (1993). *Strategi Kebudayaan: Suatu Pendekatan Filosofis*. Jakarta : Penerbit PT Grameia bekerja sama dengan dengan LPSP (Lembaga Pengkajian Strategi dan Pembangunan).
- Tjokrowinoto, Moeljarto (2002). *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Cetakan IV. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Wibisono, Koento (1998). “Wawasan Kebangsaan dalam Era Reformasi” dalam Jurnal *Filafat Pancasila*. Edisi Nomor 2 Thn.II, Desember 1998.
- Zamroni (1993).”Perkembangan Pendidikan dalam bayang-bayang Ekonomi: Perlunya Kekuatan Nasional Pendidikan” dalam *Prospektif*. Volume 5 Nomor 3, tahun 1993..

